



## WALI KOTA BIMA

### SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**A**lhamdullillahirabbil alamin, semoga rahmat dan hidayah Allah selalu tercurah untuk kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara. Sholawat dan Salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam. Semoga kita semua mendapatkan Syafaatnya di Yaomil Kiamah, Aamiin.



Saya menyambut gembira atas terbitnya buku “Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food security and Vulnerability Atlas /FSVA)” Kota Bima tahun 2021. Keberadaan peta ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pembangunan ketahanan pangan di Kota Bima.

.Komitmen pemerintah Kota Bima adalah menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas RPJMD, sehingga kebijakan pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, infrastruktur serta jasa diupayakan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Saya selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan sangat berbesar hati atas terbitnya buku peta FSVA ini, sehingga kita dapat melihat secara riil kondisi mikro hingga ke tingkat kelurahan. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua dan membantu kita dalam memperbaiki dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kota Bima.

Kota Bima, September 2021

WALIKOTA BIMA

**H. MUHAMMAD LUTFI, SE**

## KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA

**P**angan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka “malapetaka”; oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner (Ir. Soekarno)“.



Begitu pentingnya permasalahan pangan bagi suatu bangsa mendorong setiap negara untuk berusaha mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, sehingga mampu dan dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan sampai dengan tingkat perseorangan. Dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional yang efektif, tentu diperlukan informasi dalam bentuk kajian analisis ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA*) Tahun 2021 sebagai upaya untuk mempertajam analisis FSVA yang telah disusun sebelumnya. Secara khusus, FSVA dapat menyediakan informasi dan hasil analisis yang layak untuk dijadikan acuan bagi pengambil keputusan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kebijakan dalam penanggulangan rawan pangan dan gizi.

Tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bima Tahun 2021 adalah bagian dari upaya Dinas Ketahanan Pangan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimum Ketahanan Pangan di Kota Bima. Sehingga kedepannya data yang tersedia menjadi dasar untuk mengoptimalkan pelayanan ketahanan pangan bagi masyarakat.

Semoga Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bima tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu acuan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan di Kota Bima.

Kota Bima, September 2021  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Bima

**Ir. SYAMSUDIN**  
NIP. 19620103 199203 1 006

## RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kota Bima merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kelurahan. Lima indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kota Bima.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Kelurahan diklasifikasikan dalam 5 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Kelurahan/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2021 menunjukkan bahwa kelurahan rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 9 kelurahan dari 41 kelurahan (22%) yang terdiri dari 6 kelurahan ( 7%) Prioritas 1; 2 kelurahan (5%) Prioritas 2; 1 kelurahan (2%) dan

41 kelurahan Prioritas 3 (12%). Kelurahan prioritas 1 tersebar 4 kelurahan di kecamatan Rasanae Timur dan 2 kelurahan di Kecamatan Raba;. Kelurahan prioritas 2 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Rasanaa Timur; 1 Kelurahan di kecamatan Raba;. Kelurahan prioritas 3 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Asakota;

7. Karakteristik kelurahan rentan pangan ditandai dengan (1) Luas lahan baku sawah yang sangat minim, (2) Sarana Ekonomi yang tidak berkembang, (3) Kemiskinan yang masih melingkar, (4) Tenaga kesehatan yang tidak memadai, dan (5) Akses transportasi yang sangat tidak mendukung serta (6) Tidak didukung oleh ketersediaan air bersih
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan kelurahan diarahkan pada kegiatan:
  - a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah
  - b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan
  - c. Penyediaan tenaga kesehatan
  - d. Peningkatan Akses transportasi laut melalui pembangunan Jembata layang
  - e. Peningkatan Luas lahan baku sawah melalui pembukaan lahan sawah baru dan pengaturan tata ruang
  - f. Peningkatan Sarana Ekonomi yang menampung hasil produksi pangan melalui pembinaan kelembagaan usaha kelompok, insentif modal usaha dan pembinaan jaringan kemitraan.

## DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
SAMBUTAN BUPATI BIMA.....	ii
SAMBUTAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. BIMA.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR PETA .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
KONTRIBUTOR.....	xi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pemikiran.....	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	3
1.3. Metodologi.....	6
<b>BAB 2. KETERSEDIAAN PANGAN .....</b>	<b>10</b>
2.1. Sarana dan Prasarana Ekonomi .....	10
2.2. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan.....	11
<b>BAB 3. AKSES TERHADAP PANGAN DAN PENGHIDUPAN .....</b>	<b>13</b>
3.1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah .....	13
3.2. Akses Trasportasi.....	16
3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan .....	24
<b>BAB 4. PEMANFAATAN PANGAN .....</b>	<b>18</b>
4.1. Akses Tenaga Kesehatan .....	18
4.2. Akses Air Bersih .....	19
4.3. Dampak dari Status Kesehatan .....	21
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan .....	21
<b>BAB 5. KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN BERDASARKAN</b>	
<b>INDIKATOR KETAHANAN PANGAN KOMPOSIT .....</b>	<b>25</b>
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan .....	25
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan .....	27

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Indikator FSVA Kabupaten Bima Tahun 2021 .....	6
Tabel 2.1.	Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas .....	10
Tabel 3.1.	Jumlah Kelurahan Prioritas 1 Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Terendah FSVA Kab. Bima Tahun 2021.....	14
Tabel 4.1.	Sebaran tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas .....	18
Tabel 4.2.	Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas.....	19
Tabel 4.3	Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Bima Tahun 2014-2018 .....	21
Tabel 5.1	Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas .....	25

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Struktur PDRB Kabupaten Bima tahun 2017 – 2019 .....	2
Grafik 2.1. Prioritas Kelurahan berdasarkan Indikator Rasio Sarana Ekonomi yang menjual bahan pangan Pokok.....	11
Grafik 3.1. Sebaran kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas di Kabupaten Bima Tahun 2021.....	14
Grafik 3.2. Prioritas Kelurahan Berdasarkan Indikator Akses Traspotasi .....	16
Grafik 4.1 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas .....	20
Grafik 4.2. Prioritas Kelurahan Berdasarkan Indikator Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih.....	19
Grafik 4.3. Sebaran Penderita Gizi Buruk .....	21

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi.....	4
--	---

## DAFTAR PETA

	<i>Hal</i>
Peta 1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bima Tahun 2021 .....	35
Peta 3. Peta Indikator Sarana Ekonomi Pangan Kota Bima Tahun 2021 .....	36
Peta 4. Peta Indikator Tidak Sejahtera Kota Bima Tahun 2021 .....	37
Peta 5. Peta Indikator Akses jalan Kota Bima Tahun 2021 .....	38
Peta 6. Peta Indikator Akses Air Bersih Kota Bima Tahun 2021 .....	39
Peta 7. Peta Tenaga Kesehatan Kota Bima Tahun 2021 .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1. Daftar Nama Petugas Pengumpul Data (Enumerator) Tingkat Kelurahan .....	42
Lampiran 1.2. Hasil Analisis Prioritas Per Indikator dan Hasil Analisis Prioritas Komposit .....	43

## KONTRIBUTOR

### I. Tim Pengarah :

1. Walikita Bima
2. Kepala BAPPEDA Kota Bima
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
4. Kepala Dinas Pertanian Kota Bima
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima
6. Kepala BPS Kota Bima

### II. Tim Pelaksana :

1. Ir. Syamsudin, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
2. Masita, SP, Kepala Bidang Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima
3. H. Idrus H.Muhammad, Anggota
4. Ir. Suaeb, Anggota
5. Marlina, S.Pt Anggota
6. Abdul Najir, S.Pt., MM Anggotn
7. Ir. Peter Wiliem Anggota
8. Nurramdani, S.ST Anggota
9. R.A Rindarsih W, SP Anggota
10. Mufidah, SE Anggota

### III. Balai Penyuluhan Pertanian :

1. BPP Kecamatan Asakota
2. BPP Kecamatan Mpunda
3. BPP Kecamatan Raba
4. BPP Kecamatan Rasanae Timur
5. BPP Kecamatan Rasanae Barat

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG DAN DASAR PEMIKIRAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

**Bima** adalah sebuah kota otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kota Bima berdasarkan data tahun 2000 tercatat sebesar 116.295 jiwa yang terdiri dari 57.108 jiwa (49%) penduduk laki-laki dan 59.187 jiwa (51%) penduduk perempuan. Sebaran penduduk kurang merata, konsentrasi penduduk berada di pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Penduduk terbanyak berada di Kelurahan Paruga, yaitu berjumlah 12.275 jiwa (11%) dan paling sedikit di Kelurahan Kendo yang berjumlah 1.130 jiwa (1%). Selanjutnya berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Kota Bima berjumlah 142.443 jiwa yang terdiri dari 69.8411 jiwa laki-laki dan 72.602 jiwa perempuan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kota Bima sebanyak 155.140 jiwa, dengan kepadatan 694 jiwa/km<sup>2</sup>.

Secara geografis Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118°41'00"-118°48'00" Bujur Timur dan 8°20'00"-8°30'00" Lintang Selatan. Kota Bima sendiri mempunyai luas wilayah sebesar 222,25 km<sup>2</sup>. Kota Bima memiliki areal tanah berupa: persawahan seluas 1.923 hektare (94,90% merupakan sawah irigasi), hutan seluas 13.154 ha, tegalan dan kebun seluas 3.632 ha, ladang dan huma seluas 1.225 ha dan wilayah pesisir pantai sepanjang 26 km. Secara umum kondisi tanah di Kota Bima didominasi oleh gunung batu, hal ini menyebabkan rata-rata masyarakatnya bertani dengan menanam jagung dan tanaman keras lainnya.

Berdasarkan kategori iklim, Kota Bima memiliki iklim sabana tropis (*Aw*). Tingkat curah hujan tahunan kota Bima berkisar antara 1000–2000 mm per tahun dengan jumlah hari hujan bervariasi antara 80–140 hari hujan per tahun. Sementara itu, matahari bersinar terik sepanjang musim dengan rata-rata intensitas penyinaran rata-rata 71,1%. Suhu udara rata-rata di wilayah ini sebesar 21 °C sampai 32,8 °C. Suhu tertinggi terjadi pada Bulan Oktober dengan suhu berkisar 37,2 °C sampai 38 °C. Hal ini menyebabkan kota Bima ditetapkan sebagai kota terpanas di Indonesia pada tahun 2014.

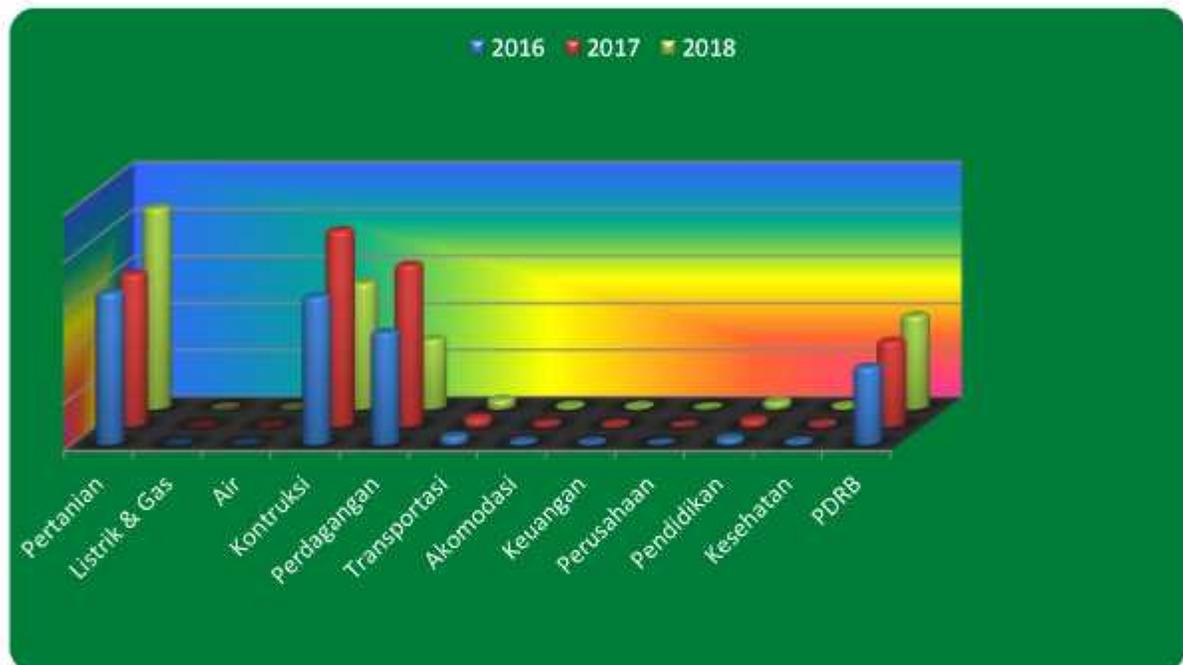
Transportasi di Kota Bima ditunjang oleh prasarana jalan: terminal dan pelabuhan laut. Panjang jalan raya sekitar 805,02 km yang terdiri dari Jalan Negara (38,56 km), Jalan Provinsi (52,20 km) dan Jalan Kabupaten (174,26 km) yang sebagian besar merupakan jalan beraspal dan sebagian lainnya jalan perkerasan batu dan jalan tanah.

Sedangkan transportasi laut ditunjang oleh pelabuhan laut sebagai pintu gerbang utama masuknya penumpang, barang dan jasa. Pelabuhan laut Bima selain dapat disinggahi kapal-kapal besar seperti KM AWU, KM Tatamelau, KM Kelimutu, KFC Barito

dan KFC Serayu serta kapal-kapal perintis. Disamping itu juga menjadi pusat bongkar muat barang ekspedisi dan pelayaran.

Struktur perekonomian suatu daerah menggambarkan bagaimana kekuatan sektor-sektor tertentu menjadi pilar penopang perekonomian daerah dan bagaimana ketergantungan daerah terhadap sektor tersebut. Perekonomian Kota Bima tergantung pada sektor Pertanian, yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku, dimana laju pertumbuhan PDRB Kabupaten nampak dalam grafik berikut :

Grafik 1.1 Struktur PDRB Kota Bima tahun 2016 – 2018



Sumber : Kota Bima Dalam Angka, 2019 (BPS)

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2021.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kelurahan.

Pengembangan FSVA tingkat kelurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

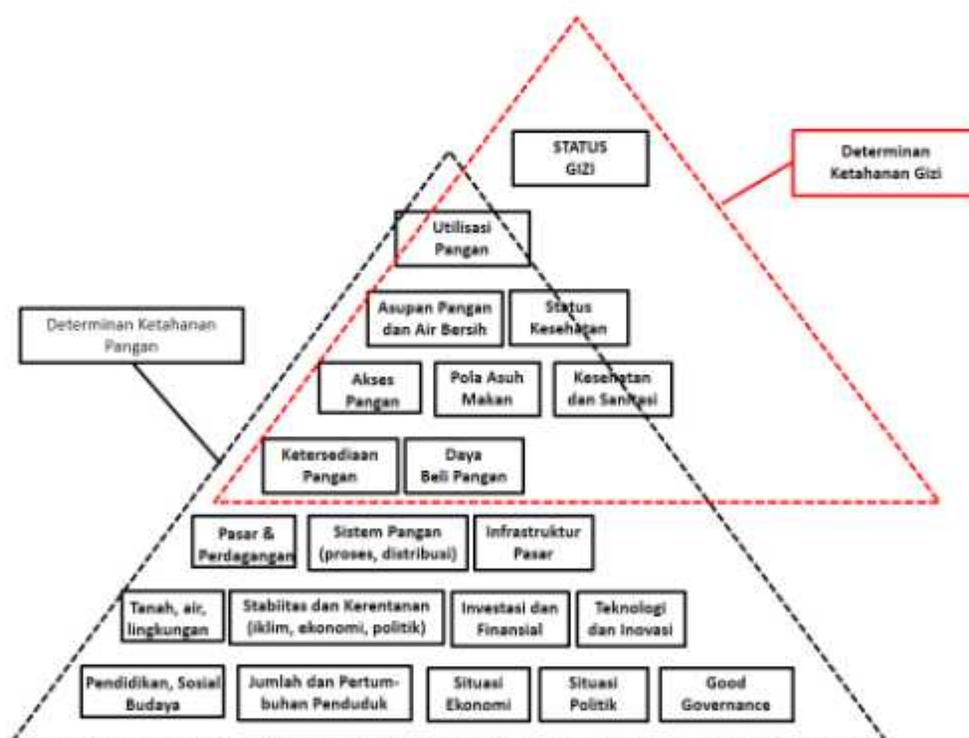
## **1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI**

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO<sup>1</sup> mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013<sup>2</sup> juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi  
(Sumber: FAO dan UNSCN)

<sup>1</sup> Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012,

<sup>2</sup> Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

**Ketersediaan pangan** adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

**Akses pangan** adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

**Pemanfaatan pangan** merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

**Dampak gizi dan kesehatan** merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

**Kerawanan pangan transien** adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari

pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### 1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

#### Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh kelurahan.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

**Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2021**

Indikator	Definisi	Sumber Data
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kelurahan	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah kelurahan	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2020
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	Potensi Kelurahan 2020, BPS Jumlah Rumah Tangga 2020 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (JAN/2019) Jumlah Rumah Tangga 2020 dari Proyeksi SP 2010

Indikator	Definisi	Sumber Data
Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Kelurahan dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Kelurahan dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Kelurahan 2020, BPS
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga kelurahan	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Jan/2019)
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk kelurahan	Potensi Kelurahan 2020, BPS Jumlah penduduk 2020 dari Proyeksi SP 2010

## **Metode Analisis**

### **1. Analisis Indikator Individu**

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

### **2. Analisis Komposit**

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

- $Y_j$  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- $a_i$  : Bobot masing-masing indikator
- $X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

**Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu**

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kelurahan	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6
4.	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	1/6
8	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>

- c. Mengelompokkan kelurahan/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i C_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

$K_j$  : *cut off point* komposit ke-J

$a_i$  : Bobot indikator ke-i

$C_{ij}$  : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kelurahan/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kelurahan/kelurahan dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kelurahan/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di kelurahan/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

### **3. Pemetaan**

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

## BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

### 2.1 SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

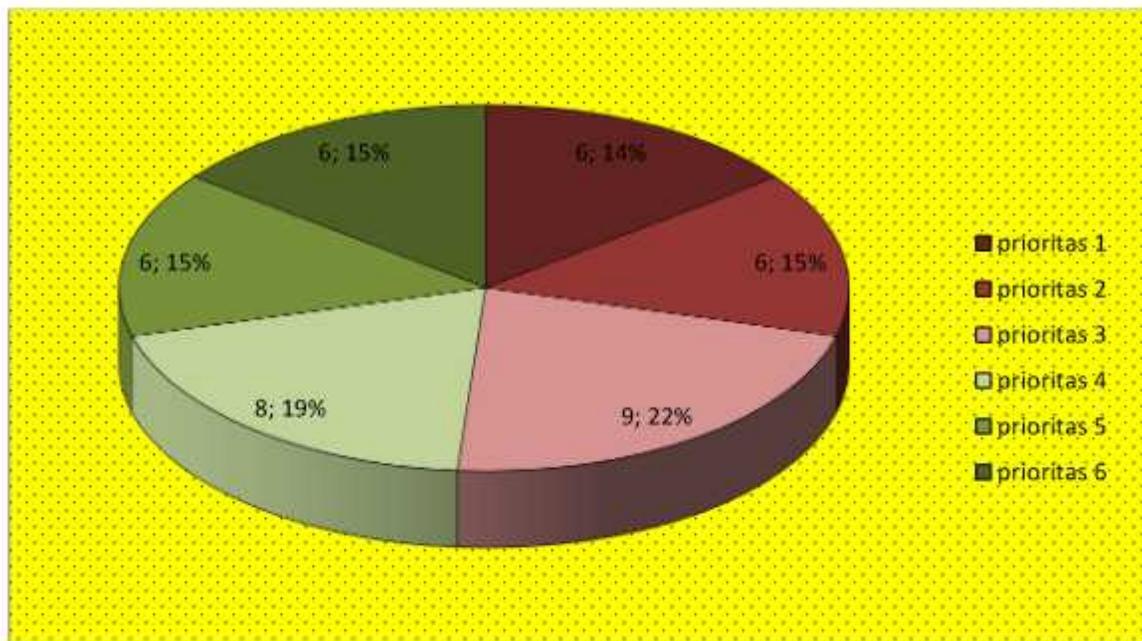
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut.

Dari 41 kelurahan di Kota Bima, 6 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (15 %), 6 kelurahan prioritas 2 (15 %) dan 9 kelurahan prioritas 3 (22 %).

Tabel 2.1 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Kelurahan	Porsentase (%)
1	1	0,018	6	15
2	2	0,037	6	15
3	3	0,053	9	22
4	4	0,067	8	20
5	5	0,087	6	15
6	6	0,129	6	15

Grafik 2.1 Prioritas Kelurahan berdasarkan Indikator Rasio Sarana Ekonomi yang menjual bahan pangan Pokok.



#### 2.4 Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Jumlah penduduk Kota Bima terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 2,0 % per tahun hingga pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Bima sebanyak 155.140 jiwa, dengan kepadatan 694 jiwa/km<sup>2</sup>. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 4%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

##### Strategi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Upaya peningkatan ketahanan pangan idealnya adalah program dan kegiatan multisektoral mulai dari penyediaan bahan pangan, penyediaan infrastruktur untuk distribusi pangan, dan penyediaan sarana prasarana pengolahan serta pemanfaatan pangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ketahanan pangan suatu daerah baik dari segi ketersediaan, keamanan dan keragaman pangan.

Oleh karena itu, Untuk mempercepat pencapaian peningkatan ketahanan pangan maka diperlukan strategi sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018 – 2023, yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif
2. Meningkatkan kualitas belanja masyarakat Kota Bima melalui stabilisasi perekonomian, pembangunan kawasan dan penguatan sector strategi
3. Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS

5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung produktifitas sector unggulan daerah dan investasi

Strategi tersebut dilaksanakan melalui keterpaduan tujuan, sasaran dan program prioritas multi sektor sesuai dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Bima 2018-2023 sebagai berikut :

1. Pemenuhan upaya kesehatan baik perorangan maupun masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM kesehatan, ketersediaan farmasi, alkes dan sarana prasarana kesehatan lainnya
2. Pengembangan Wirausaha baru mandiri dan pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan pembangunan kawasan strategis
3. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan
4. Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan, serta memperluas cakupan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan social

## **BAB 3**

### **AKSES TERHADAP PANGAN DAN PENGHIDUPAN**

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan; dan (2) Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

#### **3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH**

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Bima. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Bima terus mengalami penurunan dari 15.700 orang (72.555 jiwa) tahun 2015 menjadi 14.800 orang tahun 2019.

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2019, terdapat 7 kelurahan (17%) yang memiliki rasio rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Prioritas 1). Sebanyak 6 kelurahan (15%) masuk prioritas 2, dan 8 kelurahan (19%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota Bima ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 21 kelurahan tersebut.

Grafik 3.1 Sebaran kelurahan dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas di Kota Bima Tahun 2021



Kelurahan-kelurahan yang termasuk pada Kelurahan Prioritas 1 berdasarkan indikator Kesejahteraan Terendah pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kota Bima tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jumlah Kelurahan Prioritas 1, 2 dan 3 Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Terendah FSVA Kota Bima Tahun 2021

No.	Kelurahan Prioritas 1, 2 dan 3	Kecamatan
1	NUNGA	RASANA TIMUR
2	OI FO'O	RASANA TIMUR
3	NITU	RABA
4	KENDO	RABA
5	NTOBO	RABA
6	JATIBARU	ASAKOTA
7	KOLO	ASAKOTA
8	DODU	RASANA TIMUR
9	LELAMASE	RASANA TIMUR
10	RONTU	RABA
11	RITE	RABA

12	MELAYU	ASAKOTA
13	JATIWANGI	ASAKOTA
14	TANJUNG	RASANA E BARAT
15	SAMBINAE	MPUNDA
16	MATAKANDO	MPUNDA
17	KUMBE	RASANA E TIMUR
18	KODO	RASANA E TIMUR
19	PENARAGA	RABA
20	RABADOMPU BARAT	RABA
21	PENANAE	RABA

Sumber: PPFM 2019

### 3.2 AKSES TRANSPORTASI

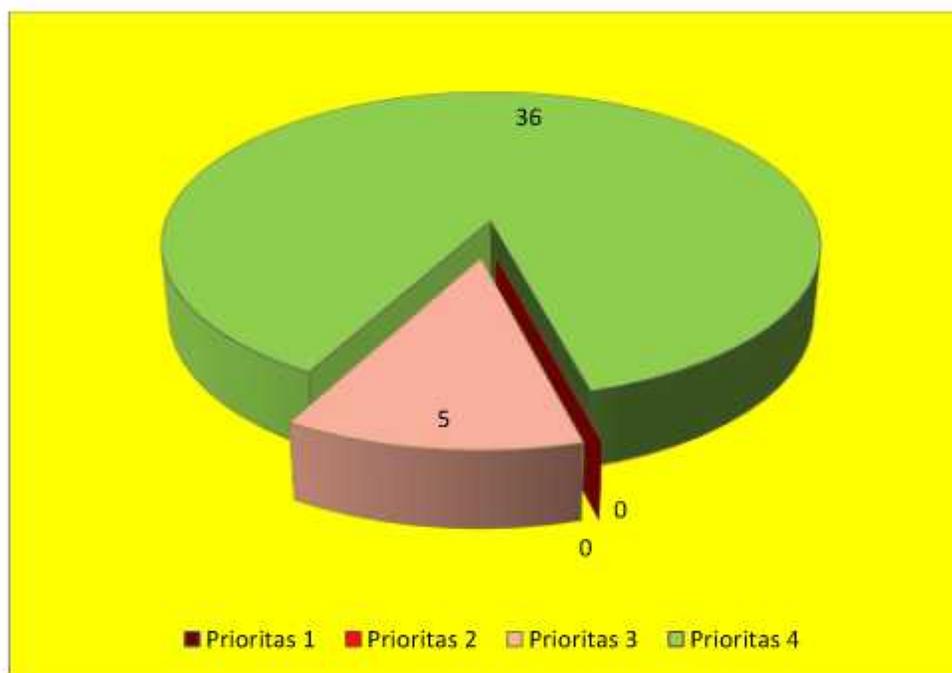
Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (farm gate price) di daerah perkelurahan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari kelurahan surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada kelurahan terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga

komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Hasil analisis komposit dengan menggunakan metode pembobotan menunjukkan bahwa dari 41 Kelurahan yang ada di Kota Bima, sebanyak 40 Kelurahan dalam kondisi aman dan 5 kelurahan berada dalam status kurang rentan (Prioritas 3) yaitu Kelurahan Oimbo, Lelamasa dan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur serta Kelurahan Nitu dan Ntobo Kelurahan Raba seperti nampak dalam (Grafik 3.2)

Grafik 3.2 Prioritas Kelurahan Berdasarkan Indikator Akses Trasportasi



Jalan merupakan moda transportasi utama di Kota Bima akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi bagian penting dari moda transportasinya. Kondisi geografis hanya memungkinkan menggunakan moda transportasi air. Masyarakat menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, contohnya di wilayah Karampi. Data yang akurat untuk moda transportasi air tidak tersedia, jenis transportasi ini tidak dimasukkan sebagai salah satu indikator akses infrastruktur.

### 3.4 Strategi Peningkatan Akses Pangan

#### Strategi Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Akses terhadap Pangan dan Penghidupan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen induk perencanaan dan penganggaran pembangunan menjadi acuan penting dalam melihat program dan kegiatan pemerintah Kota Bima dalam upaya pengurangan kemiskinan serta memperbaiki akses terhadap pangan dan penghidupan.

Strategi Pemerintah Daerah Kota Bima untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kota Bima tahun 2018 - 2023 diantaranya:

1. Peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan kawasan berbasis pertanian  
Peningkatan Produksi dan pengelolaan hasil Pertenakan
2. Pengembangan pengelolaan dan budidaya perikanan
3. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
4. Peningkatan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)  
(usulan Ketahanan Pangan)
5. Pembangunan sistim dan pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak
6. Penyambungan listrik murah dan hemat
7. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan layak huni
8. Mendorong penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman

## BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN

Dimensi ketiga dari ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: a) Pemanfaatan pangan yang bisa diakses oleh rumah tangga, dan b) kemampuan individu untuk menyerap zat gizi- pemanfaatan makanan secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya, atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga. Aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator-indikator sebagai berikut:

1. Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan terhadap Penduduk;
2. Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih;

### 4.1 AKSES AIR BERSIH

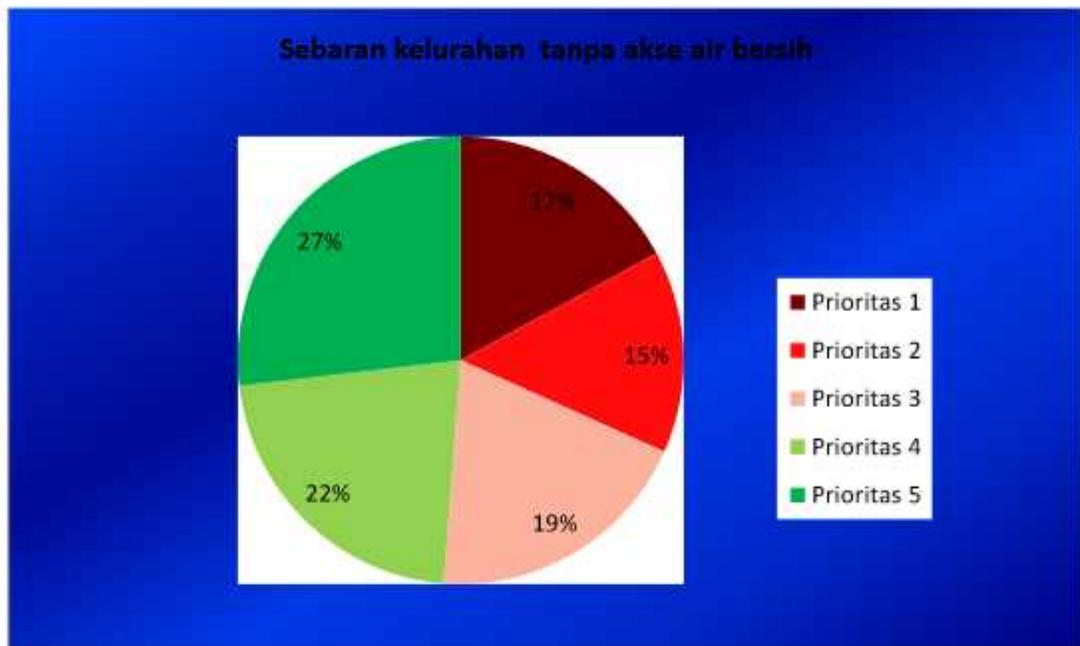
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindungi dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak<sup>3</sup>. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	7	17%
2	6	15%
3	8	19%
4	9	22%
5	11	27%
6	-	0%

<sup>3</sup> Permenkes 416 Tahun 1990

Grafik 4.1 Prioritas Kelurahan Berdasarkan Indikator Rasio Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih



#### 4.2 AKSES TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2 Sebaran tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	3,796	7	17%
2	0,904	6	15%
3	0,342	8	19%
4	0,113	9	22%
5	0,050	6	15%
6	0,023	5	12%

Grafik 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas



#### 4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

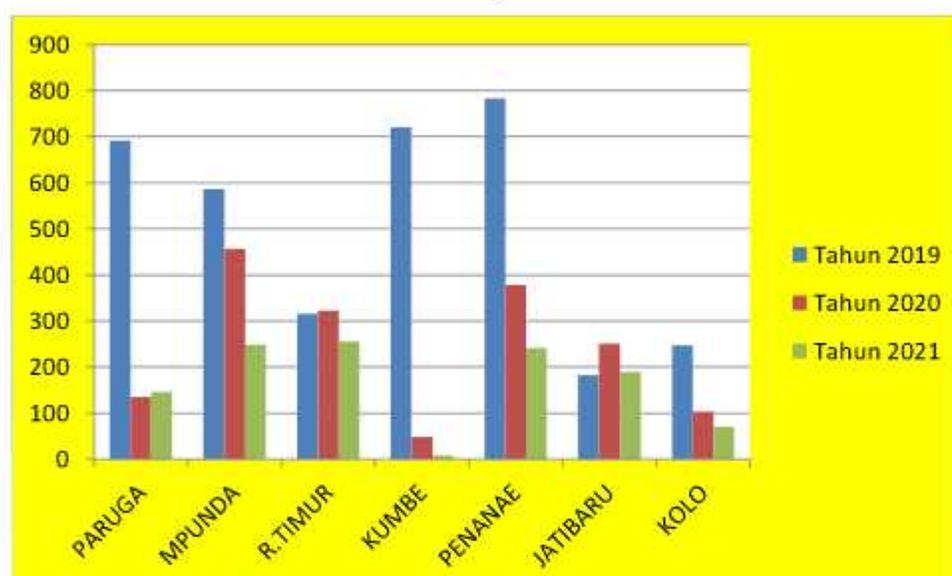
1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari -2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita stunting di Kota Bima pada tahun 2019-2021 sebanyak 6.383 balita. Jumlah penderita stunting yang tinggi ditemukan di Kecamatan Rasanae Timur, dan terendah ditemukan di Kecamatan Kumbe.

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk di Kota Bima Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	STUNTING		
		2019	2020	2021
1	Paruga	692	135	146
2	Mpunda	587	457	249
3	Rasanae Timur	316	322	255
4	Kumbe	721	48	8
5	Penanae	783	378	242
6	Jati Baru	183	251	190
7	Kolo	247	103	70

Grafik 4.3 Sebaran Penderita Stunting



#### 4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Untuk mempercepat pencapaian peningkatan ketahanan pangan maka diperlukan strategi sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018 – 2023, yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif
3. Meningkatkan kualitas belanja masyarakat Kota Bima melalui stabilisasi perekonomian, pembangunan kawasan dan penguatan sector strategis Mengembangkan sector pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang

4. Berkelanjutan
5. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS

Masalah gizi kronis (stunting) masih tetap tinggi di Kota Bima, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
  - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
  - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.

- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
  - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).
- Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
    - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
    - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
    - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
    - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
    - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
    - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
  - b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

**BAB 5**  
**KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN BERDASARKAN**  
**INDIKATOR KETAHANAN PANGAN KOMPOSIT**

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

**5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN**

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 41 kelurahan yang ada di Kota Bima maka didapatkan 2 kelurahan (Prioritas 1), 6 kelurahan (Prioritas 2), 1 kelurahan (Prioritas 3), 10 kelurahan (Prioritas 4), 16 kelurahan (Prioritas 5) dan 6 kelurahan (Prioritas 6).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
1	6	15
2	2	5
3	1	2
4	10	24
5	16	39
6	6	15

Kelurahan prioritas 1 tersebar 4 kelurahan di kecamatan Rasanae Timur dan 2 kelurahan di Kecamatan Raba, (Gambar 5.1).



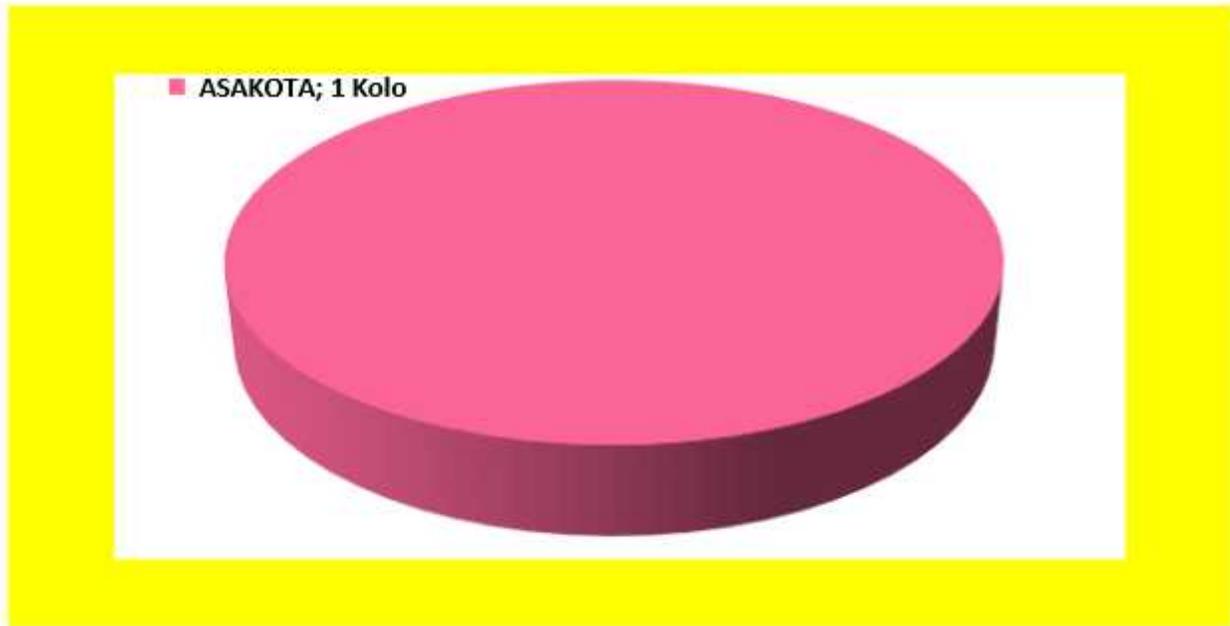
Gambar 5.1 Sebaran Jumlah Kelurahan Priroitas 1 Per Kecamatan

Kelurahan prioritas 2 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Rasanaa Timur; 1 Kelurahan di kecamatan Raba, (Gambar 5.2).



Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Kelurahan Priroitas 2 per Kecamatan

Kelurahan prioritas 3 tersebar 1 kelurahan di kecamatan Asakota, (Gambar 5.3).



Gambar 5.3 Sebaran Jumlah Kelurahan Priroitas 3 Per Kecamatan

## 5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

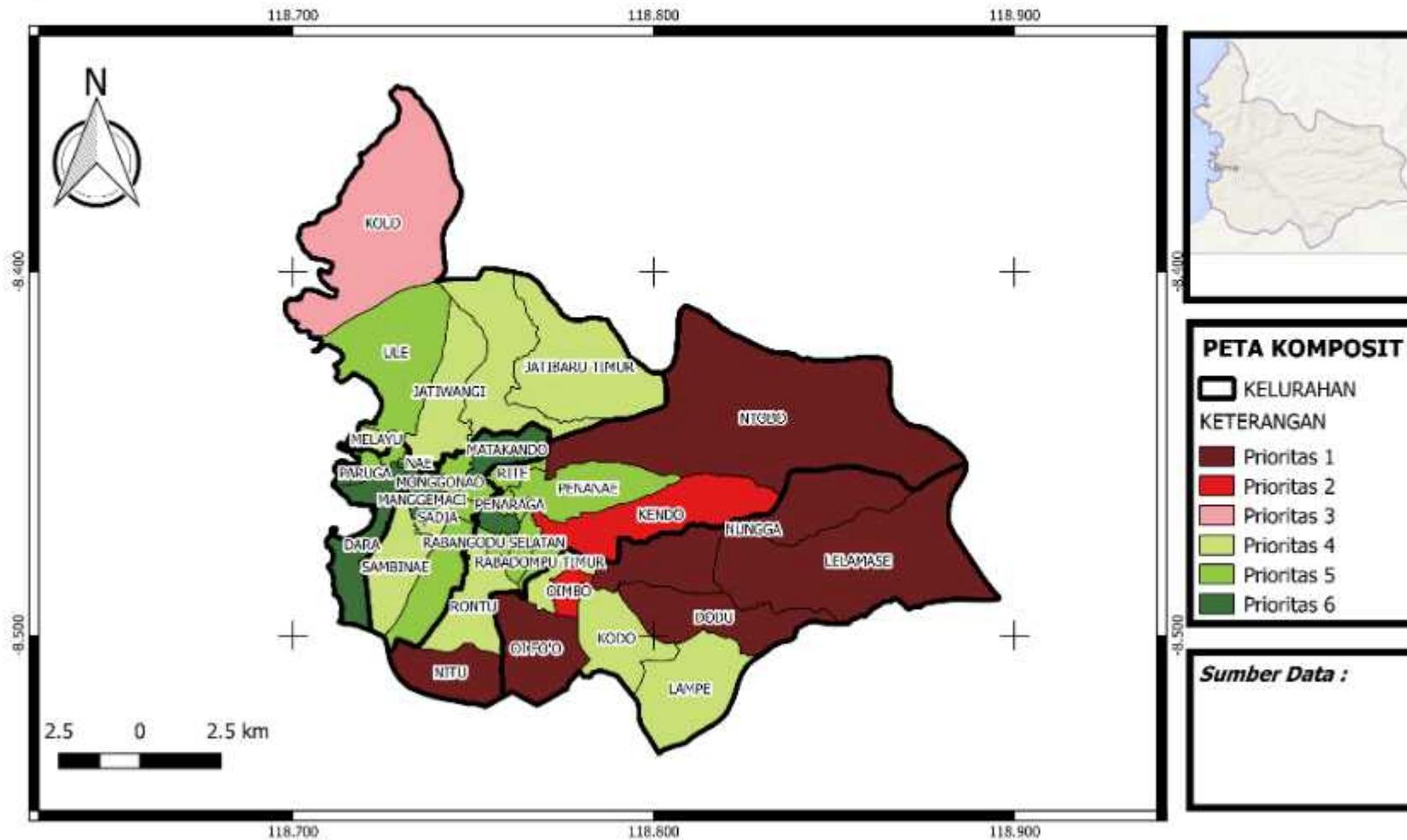
Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 secara umum disebabkan oleh: (1) Sarana Ekonomi yang tidak berkembang , (2) Kemiskinan yang masih melingkar, (3) Tenaga kesehatan yang tidak memadai, dan (4) Akses transportasi yang sangat tidak mendukung serta (6) Tidak didukung oleh ketersediaan air bersih

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) Kemiskinan yang masih melingkar, (2) Tenaga kesehatan yang tidak memadai, dan (3) Tidak didukung oleh ketersediaan air bersih

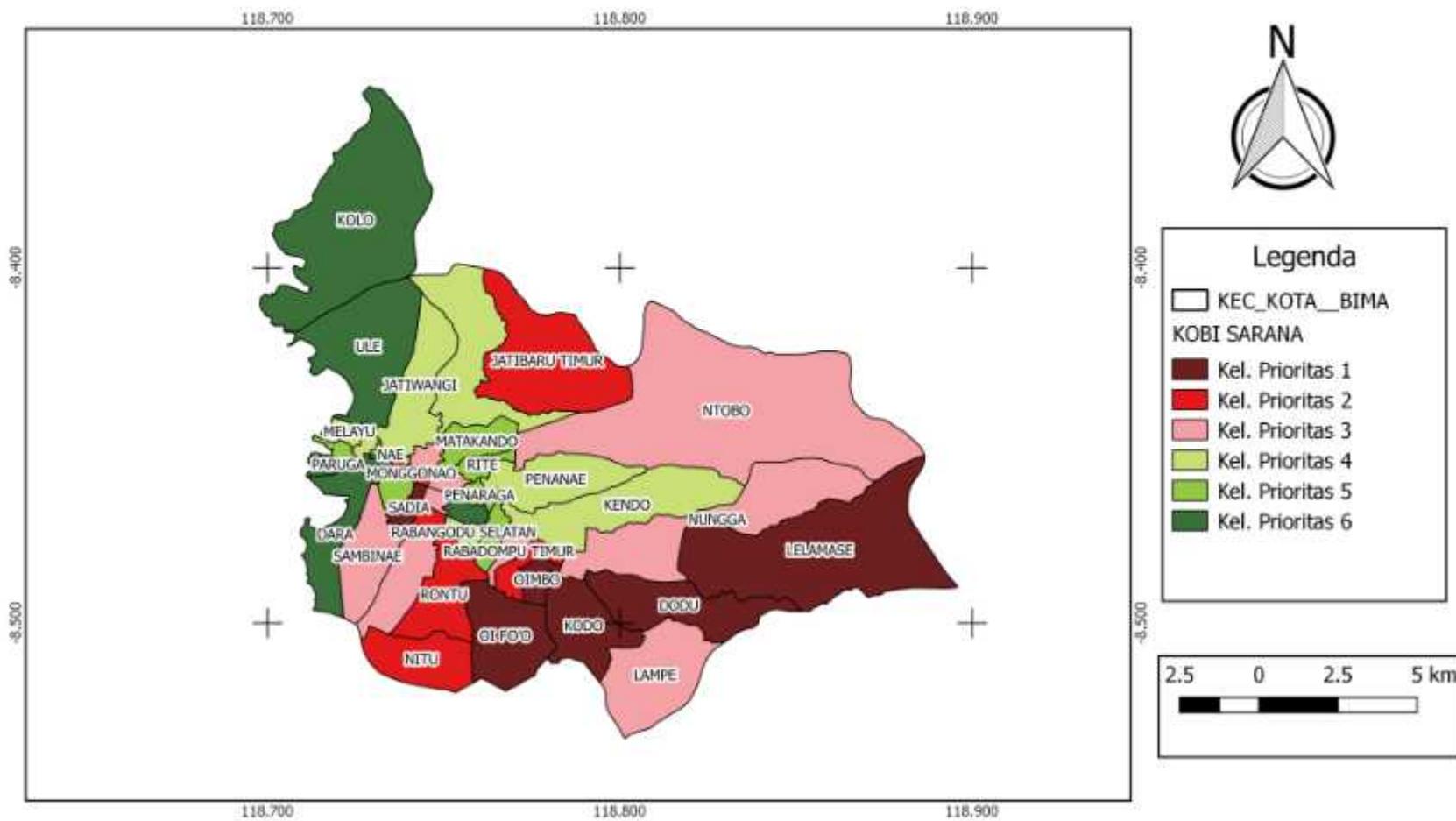
Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Kemiskinan yang masih melingkar, (2) Tenaga kesehatan yang tidak memadai, dan (3) Tidak didukung oleh ketersediaan air bersih



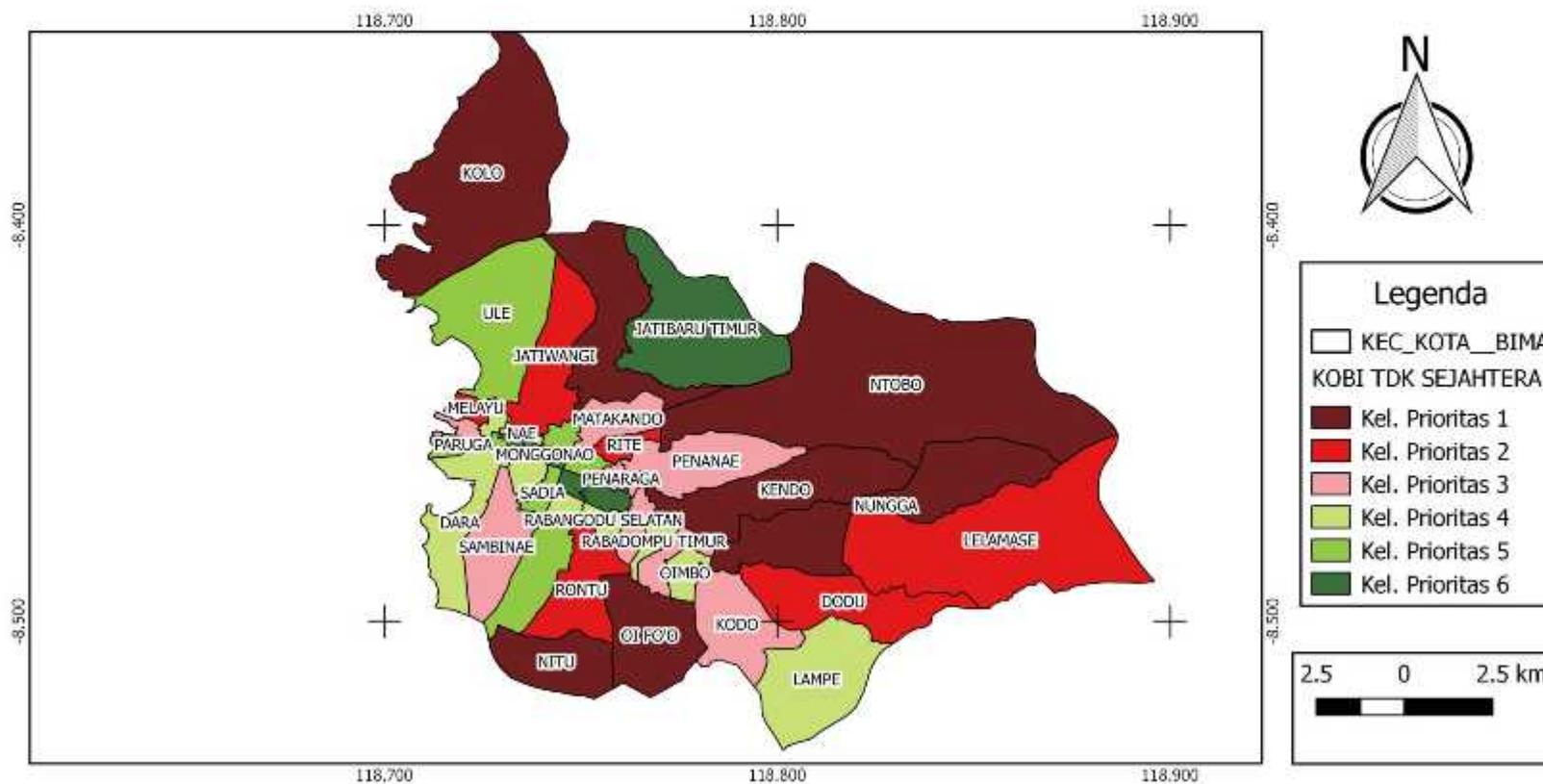
## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BIMA TAHUN 2021



### PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BIMA TAHUN 2021

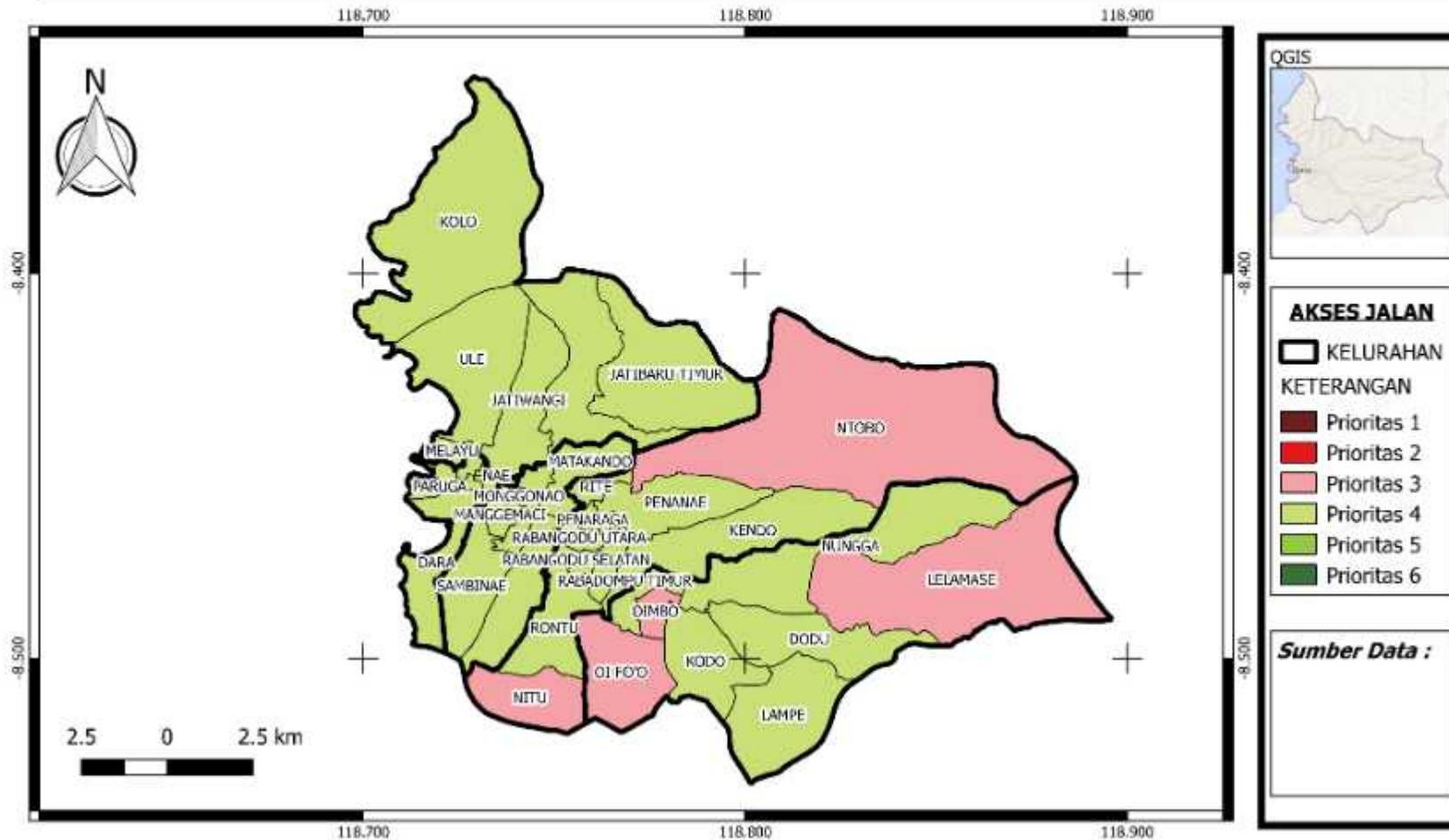


## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BIMA TAHUN 2021

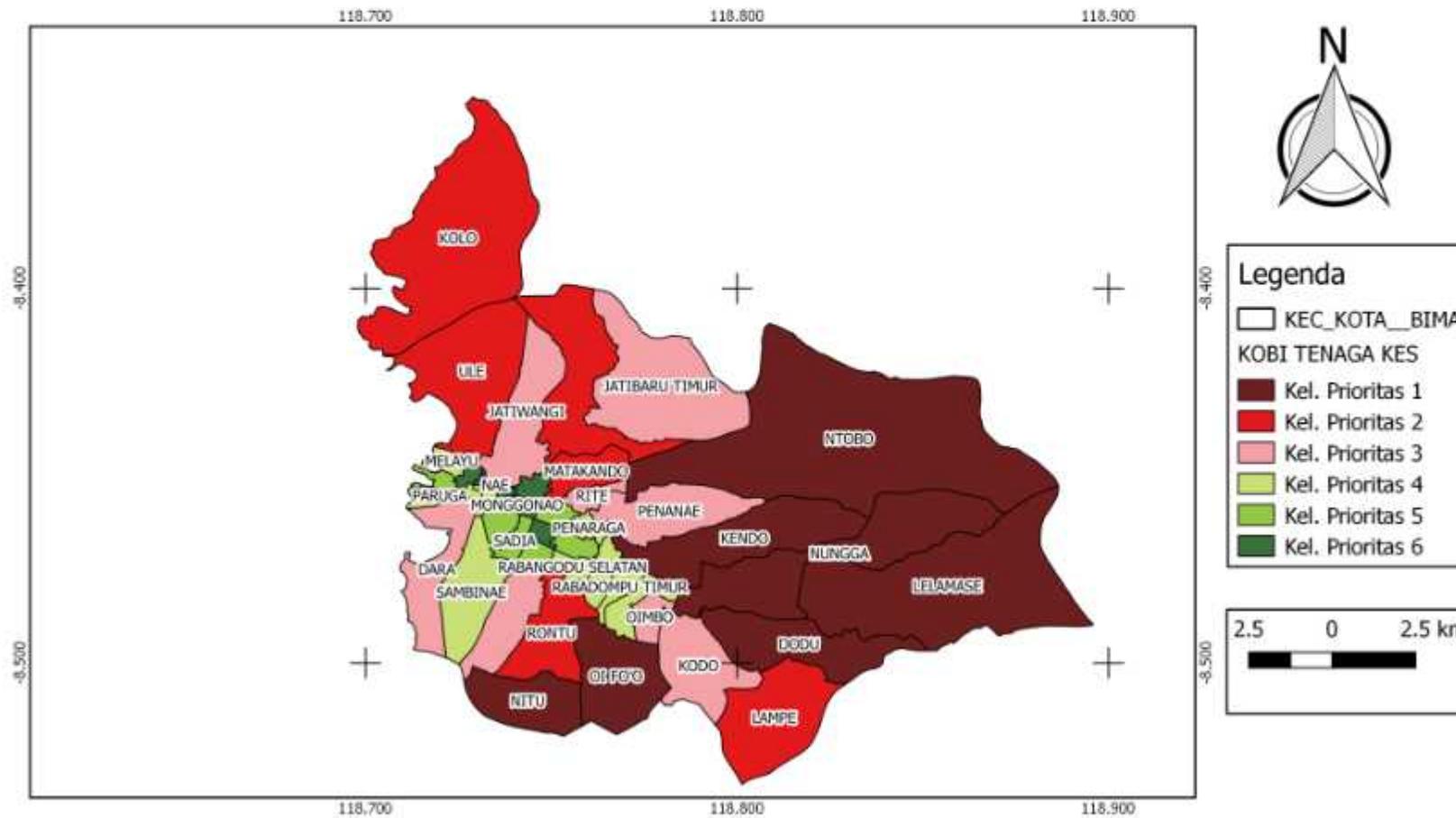




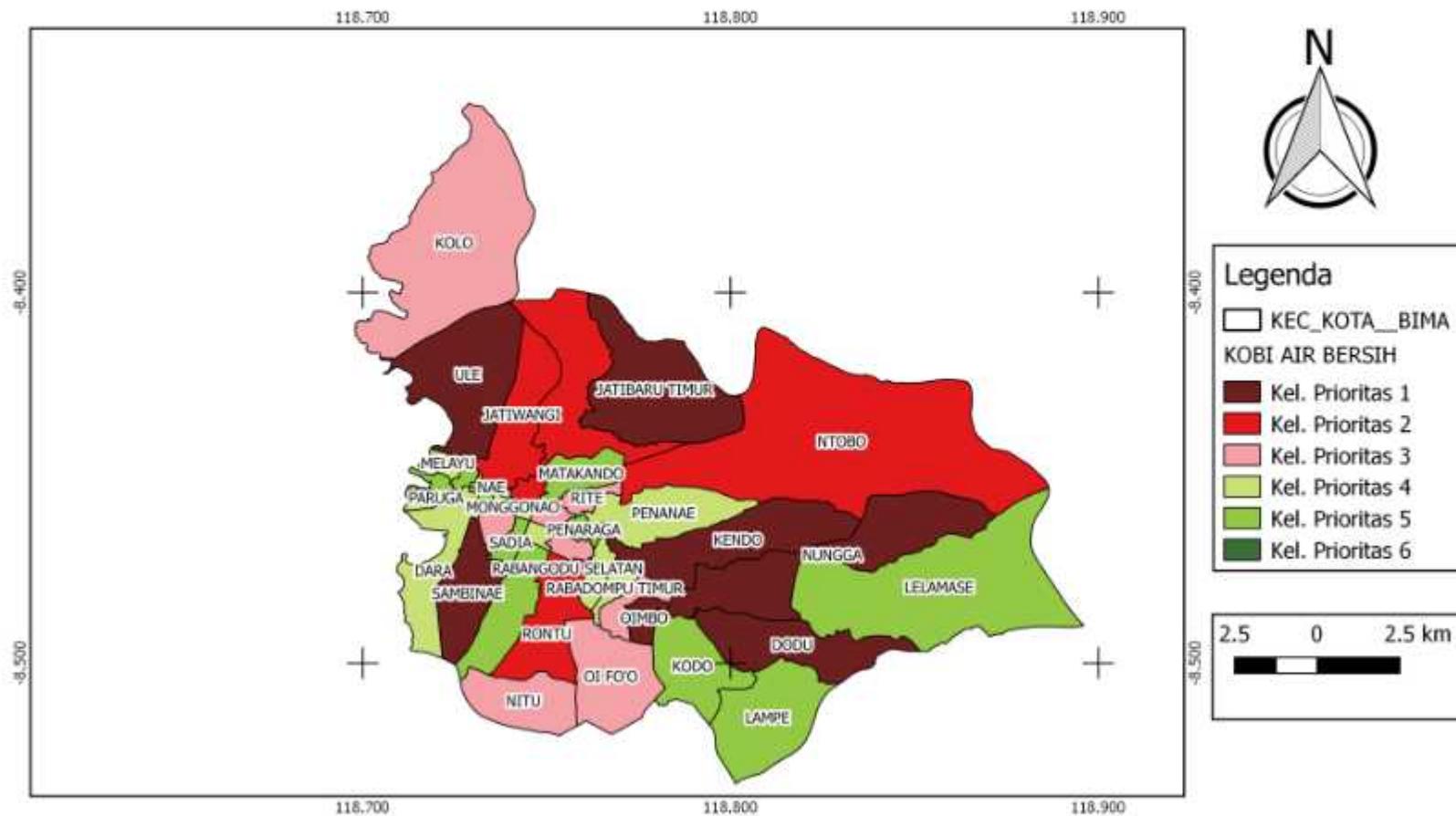
## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BIMA TAHUN 2021



## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BIMA TAHUN 2021



## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BIMA TAHUN 2021



No.	Nama Kecamatan	Kode Kec	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	1. Rasio Lahan	2. Rasio Sarana	3. Rasio Pddk Tidak Sejahtera	4. Akses Jalan	5. Rasio Tanpa Air Bersih	6. Rasio Pddk per Tenkes per Density	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
1	RASANA BARAT	5272010	5272010004	PARUGA		5	5	4	4	4	81,42	2	5
2	RASANA BARAT	5272010	5272010005	TANJUNG		5	3	4	5	5	73,22	14	5
3	RASANA BARAT	5272010	5272010006	SARAE		4	4	4	5	4	75,06	7	5
4	RASANA BARAT	5272010	5272010007	NAE		4	4	4	4	4	73,22	13	5
5	RASANA BARAT	5272010	5272010009	DARA		5	4	4	4	3	79,56	4	5
6	RASANA BARAT	5272010	5272010010	PANE		5	4	4	5	4	81,31	3	5
7	MPUNDA	5272011	5272011001	SAMBINAE		3	3	4	3	4	66,41	28	4
8	MPUNDA	5272011	5272011002	PANGGI		3	5	4	5	3	72,73	16	5
9	MPUNDA	5272011	5272011003	MANDE		2	4	4	5	5	70,04	22	5
10	MPUNDA	5272011	5272011004	SADIA		5	5	4	5	5	69,41	23	4
11	MPUNDA	5272011	5272011005	MANGGEMACI		5	4	4	3	5	75,89	5	5
12	MPUNDA	5272011	5272011006	MONGGONAO		2	4	4	4	4	71,17	20	5
13	MPUNDA	5272011	5272011007	LEWIRATO		3	4	4	4	4	74,84	9	5
14	MPUNDA	5272011	5272011008	PENATOI		3	5	4	3	5	72,52	17	5
15	MPUNDA	5272011	5272011009	SANTI		3	5	4	2	4	73,00	15	5
16	MPUNDA	5272011	5272011010	MATAKANDO		5	3	4	5	2	75,45	6	5
17	RASANA TIMUR	5272020	5272020001	LAMPE		3	4	4	5	2	69,31	24	4
18	RASANA TIMUR	5272020	5272020002	DODU		5	2	4	4	4	41,00	36	5
19	RASANA TIMUR	5272020	5272020003	NUNGGGA		3	3	4	3	3	40,93	37	5
20	RASANA TIMUR	5272020	5272020004	KUMBE		2	3	4	3	4	64,51	31	4
21	RASANA TIMUR	5272020	5272020014	OI FO'O		5	3	3	3	4	30,58	40	5
22	RASANA TIMUR	5272020	5272020015	KODO		5	3	4	5	3	65,11	30	4
23	RASANA TIMUR	5272020	5272020016	LELAMASE		5	2	3	5	3	28,58	41	5
24	RASANA TIMUR	5272020	5272020017	DIMBO		5	4	3	4	3	44,26	35	2
25	RABA	5272021	5272021001	NITU		2	3	3	3	3	35,18	38	5
26	RABA	5272021	5272021002	RONTU		2	2	4	2	2	65,15	29	4
27	RABA	5272021	5272021003	RABANGODU SELA		4	4	4	2	4	73,62	12	5
28	RABA	5272021	5272021004	RABANGODU UTAR		5	4	4	3	5	99,81	1	5
29	RABA	5272021	5272021005	PENARAGA		5	3	4	5	4	74,74	11	5
30	RABA	5272021	5272021006	RABADOMPU BARA		5	3	4	4	4	74,77	10	5
31	RABA	5272021	5272021007	RABADOMPU TIML		3	4	4	4	4	71,35	19	5
32	RABA	5272021	5272021008	KENDO		4	4	4	4	4	56,41	34	2
33	RABA	5272021	5272021009	PENANAE		4	3	4	4	3	71,13	21	5
34	RABA	5272021	5272021010	RITE		5	2	4	3	3	72,49	18	5
35	RABA	5272021	5272021011	NTOBO		3	3	3	2	3	30,90	39	5
36	ASAKOTA	5272030	5272030001	MELAYU		4	2	4	4	4	68,91	25	4
37	ASAKOTA	5272030	5272030002	JATIWANGI		4	2	4	2	3	68,88	26	4
38	ASAKOTA	5272030	5272030003	JATIBARU		4	3	4	2	2	64,20	32	4
39	ASAKOTA	5272030	5272030004	KOLO		5	4	4	3	2	63,78	33	3
40	ASAKOTA	5272030	5272030005	ULE		5	5	4	4	2	74,93	8	5
41	ASAKOTA	5272030	5272030006	JATIBARU TIMUR		2	4	4	4	3	67,02	27	4